PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

dalam

Kegiatan Verifikasi Data dan Informasi pada SIPJAKI dan Simulasi Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

P K S D K

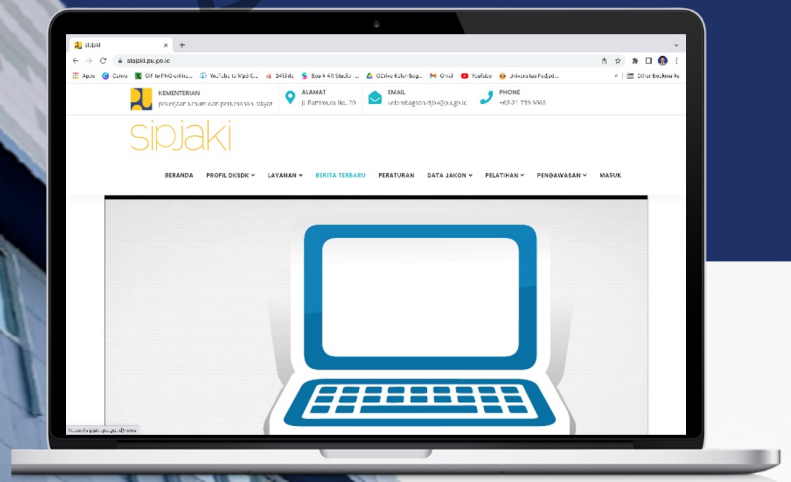

Kalimantan Timur,
2 November 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

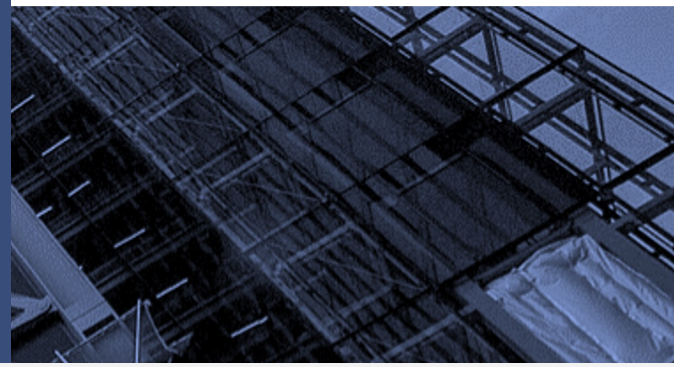

1

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

DKSDK

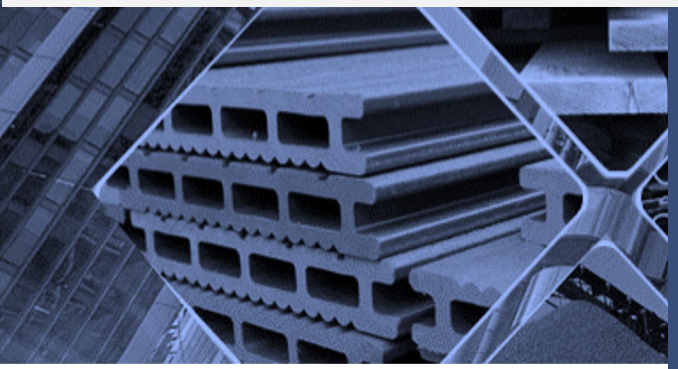

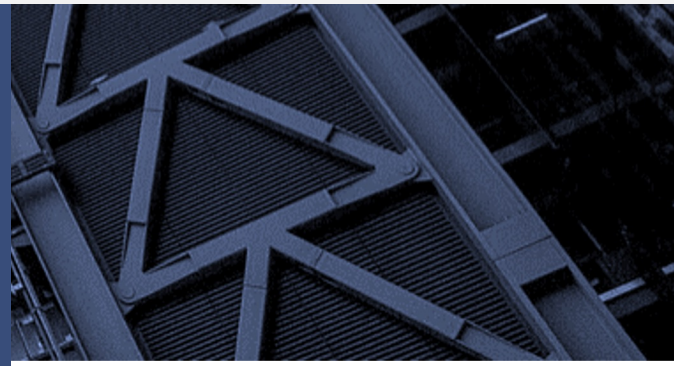

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KONDISI UMUM

Aplikasi e-Government di Instansi Pemerintah tersebar, beragam, dan **data tidak terintegrasi**

Infrastruktur data center bervariasi, **silos**, dan **tidak efisien**

DAMPAK

- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data yang kurang diyakini sepenuhnya

SOLUSI

Guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas terkait belanja TIK, maka perlu disusun pola koordinasi yang menghasilkan sistem yang **terintegrasi** dan **interoperabilitas** antar sistem baik dari sisi **proses bisnis, infrastruktur, maupun aplikasi**

PERPRES 95 Tahun 2018 tentang SPBE

PERPRES 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

KONDISI EKSISTING DATA JASA KONSTRUKSI

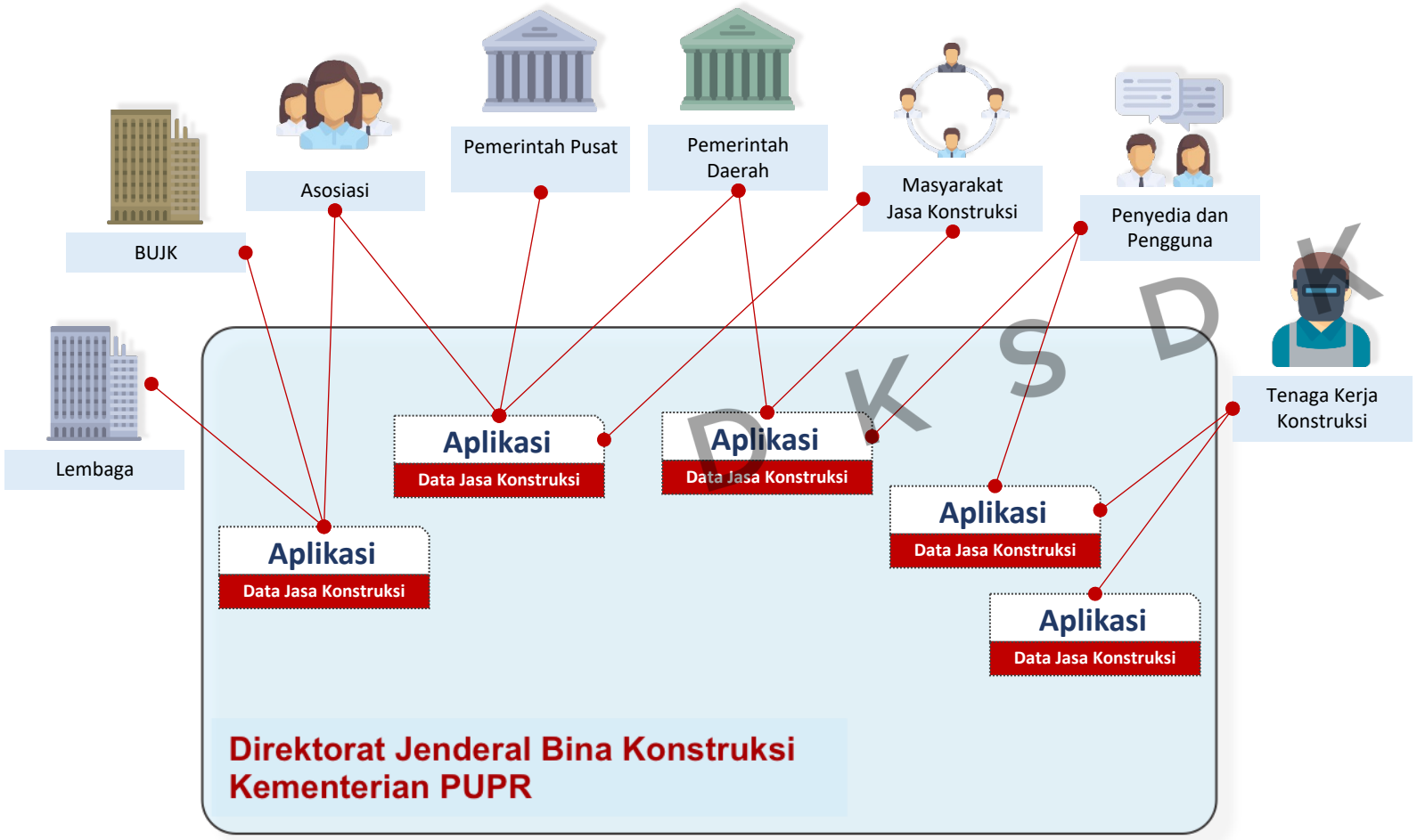

Keragaman:

-- Platform database

-- Bahasa program

-- Sistem Operasi

-- Infrastruktur

Duplikasi:

-- Referensi data

-- Akses data

-- Input data

Kebutuhan:

-- Ketersediaan data

-- Keakuratan data

-- Validasi data

-- Verifikasi data

-- Kecepatan akses

-- Kemudahan akses

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

PASAL 83

Pengguna, Penyedia, dan Institusi terkait HARUS memberikan DATA dan INFORMASI

SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI:

DIKELOLA PEMERINTAH PUSAT

- Tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Pembinaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Tugas dan layanan yang dilakukan oleh masyarakat

D K S D

* SIPJAKI berisi Data dan informasi tanggungjawab dan kewenangan serta Pembinaan Pemerintah Daerah

MANFAAT SIJK TERINTEGRASI

K

KONSEP SIJKT KEDEPAN

Sumber data jasa konstruksi berasal dari 1 aplikasi yang terintegrasi ke seluruh aplikasi yang sudah ada

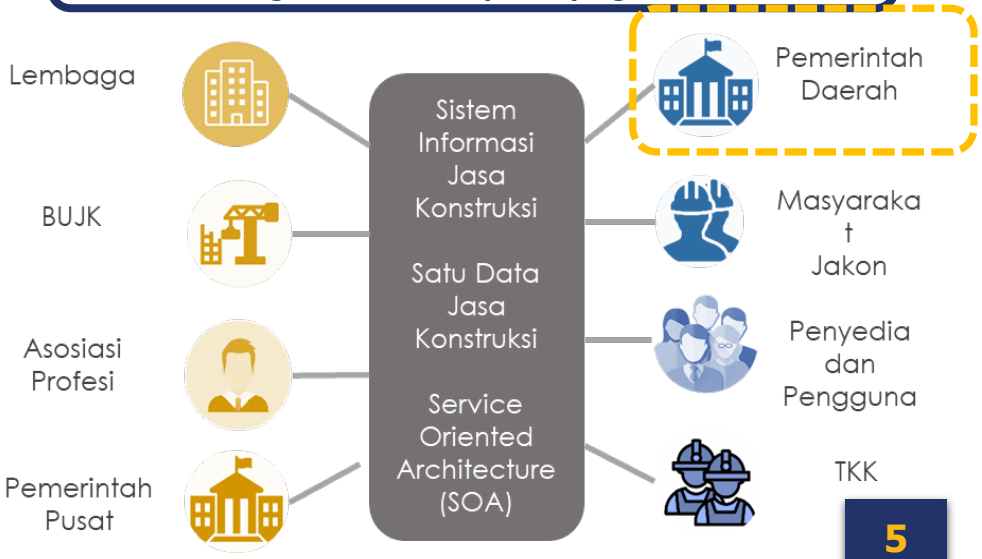

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

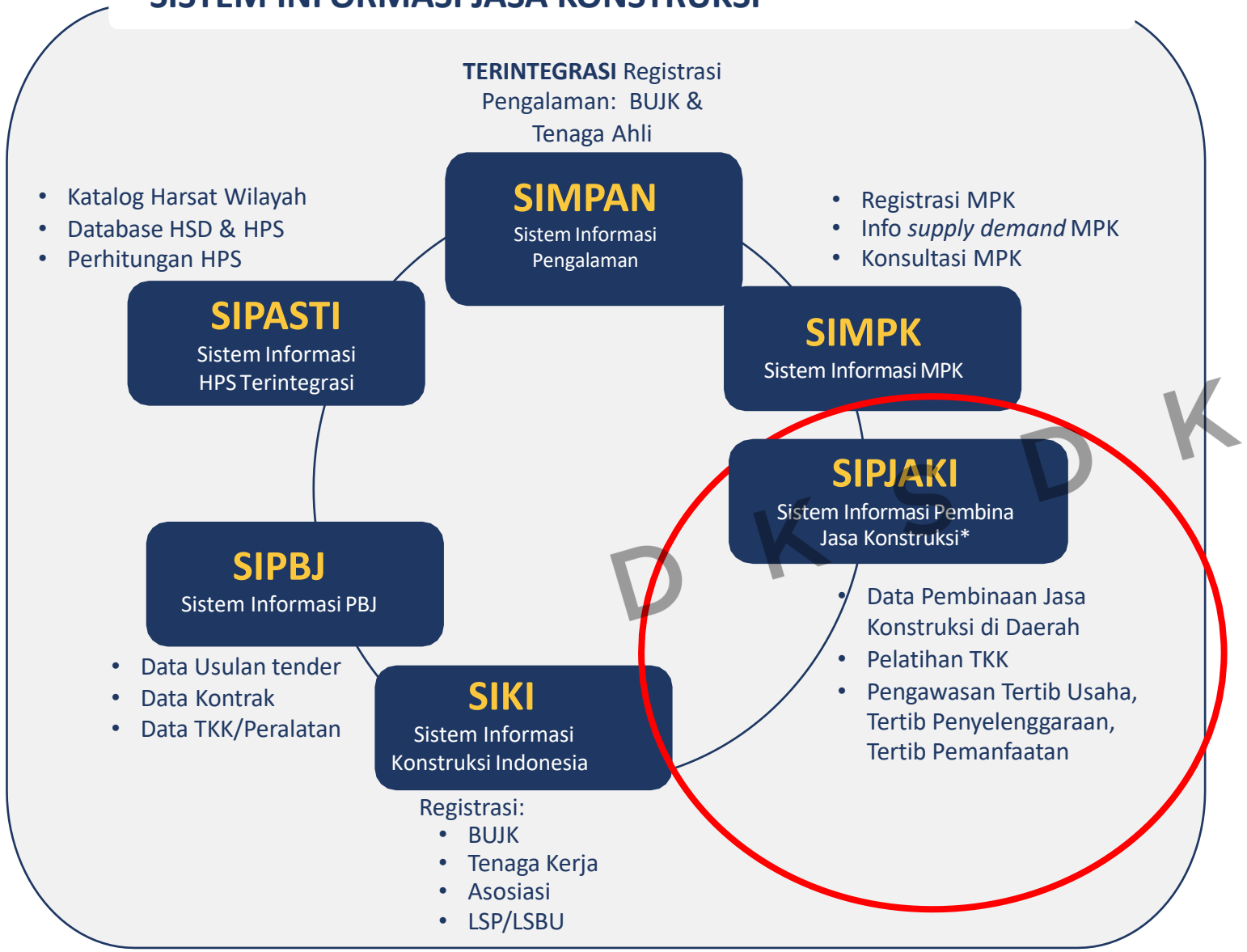

PAJAK ONLINE (KEMENKEU)
Database pajak

DUKCAPIL (KEMENDAGRI)
Database kependudukan

SPSE (LKPP)
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

OSS (BKPM)
Online Single Submission
Perijinan Berusaha Satu Pintu

AHU (KEMENKUMHAM)
Database instansi/lembaga berbadan hukum

Sumber: Paparan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi September 2021

* Sesuai Indikator Kinerja Kunci OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi (tugas dan Kewenangan OPD) mengacu pada PermenDagri Nomor 18 Tahun 2020

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENGEMBANGAN SIPJAKI

SIPJAKI BAGIAN DARI SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

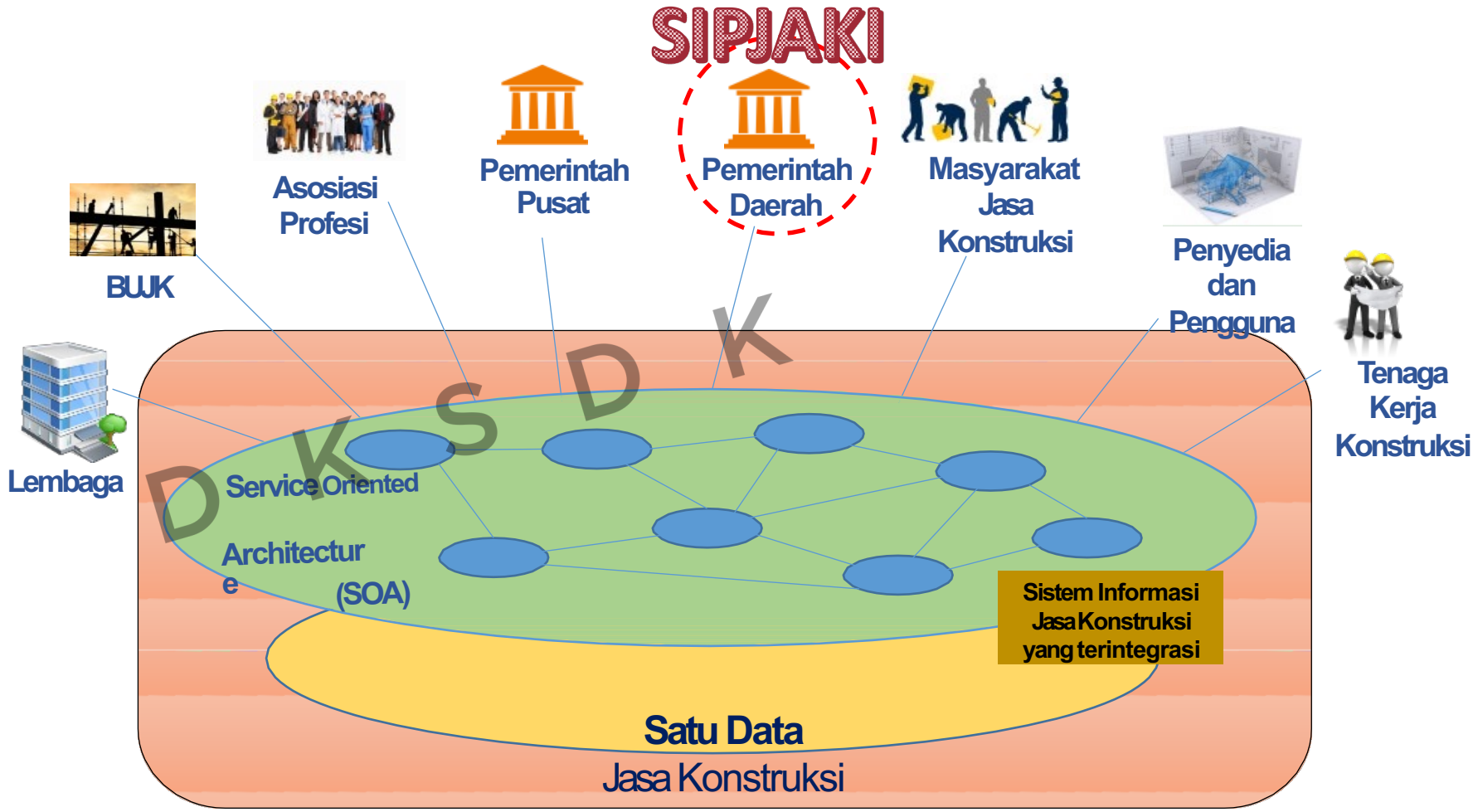

*) SOA : Arsitektur IT yang dibutuhkan agar berbagai aplikasi dapat saling bertukar data dan berkomunikasi dalam proses bisnis

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIPJAKI

SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) adalah sistem informasi guna mewadahi informasi bidang jasa konstruksi, dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi.

DASAR PENYELENGGARAAN

1. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. PP Nomor 22 Tahun 2020 JO PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksana UUJK
4. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Permen Dagri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah bidang PUPR
6. PerMen Dagri Nomor 90 Tahun 2019 jo KepMen Dagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
7. PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (indikator Kinerja Kunci)

MANFAAT SIPJAKI

1. menginformasikan dan memetakan pelaksanaan tugas kewenangan OPD dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksiserta mengukur kinerjanya
2. Sebagai masukan pengambilan keputusan kebijakan pembinaan jakon oleh pusat
3. Sebagai input bagi sistem OSS dalam proses perizinan berusaha (pada saat perpanjangan SBU/SKK)

SIPJAKI

Indikator Kinerja Kunci

SIPJAKI sebagai alat pengukur **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** Sub-Urusan Jasa Konstruksi

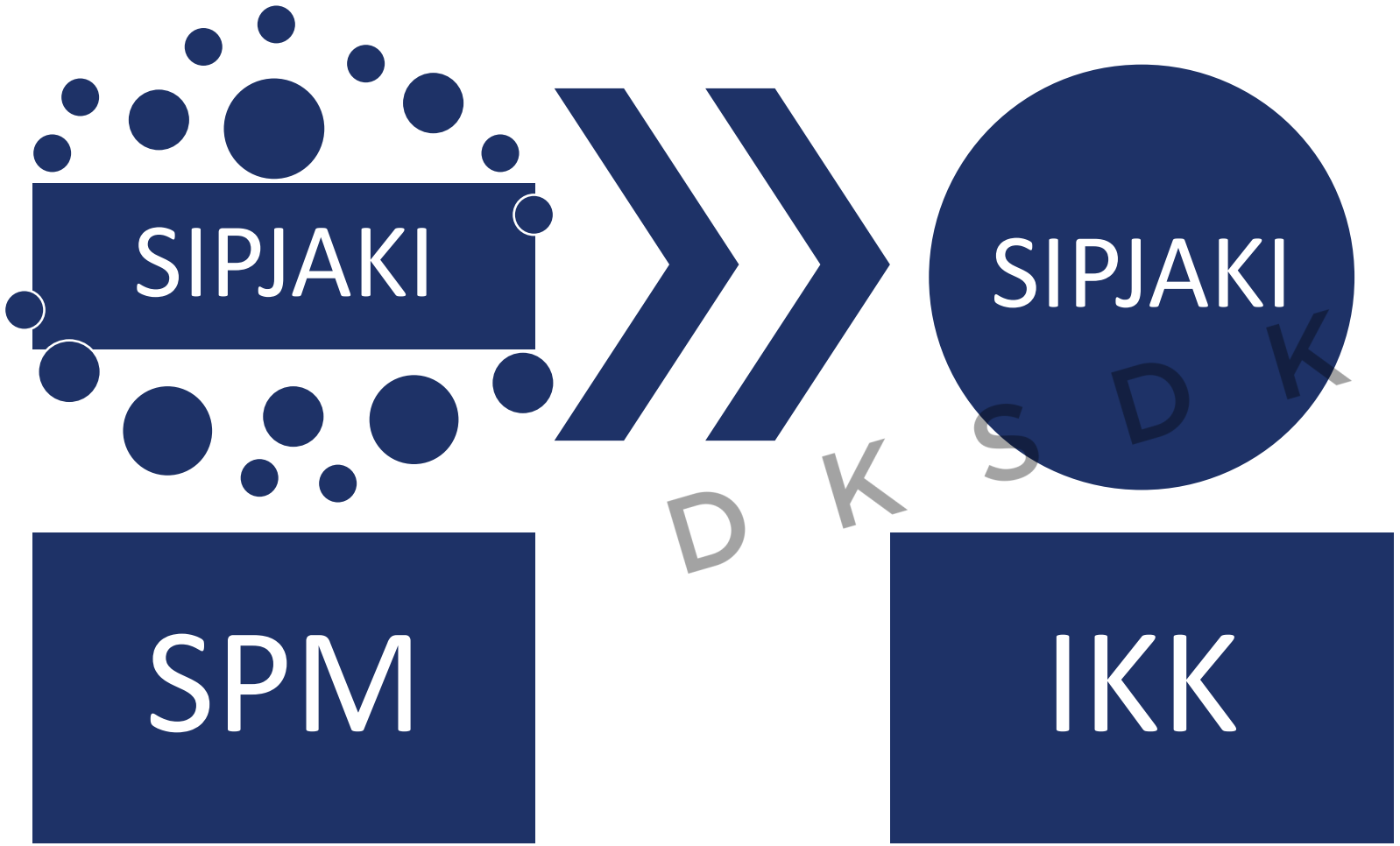

SIPJAKI sebagai alat pengukur Indikator Kinerja Kunci Sub-Urusan Jasa Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

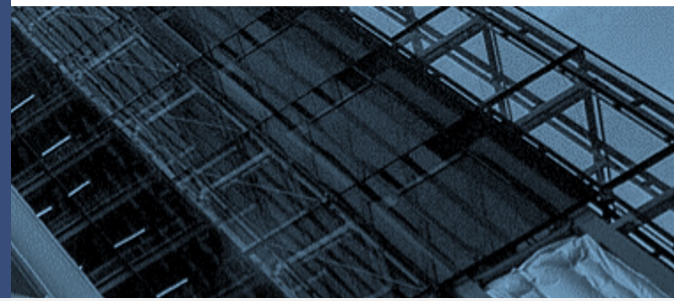

2

INDIKATOR KINERJA KUNCI KEWENANGAN OPD SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI

DKSDK

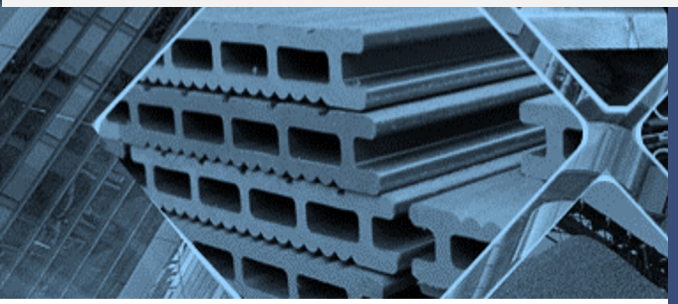

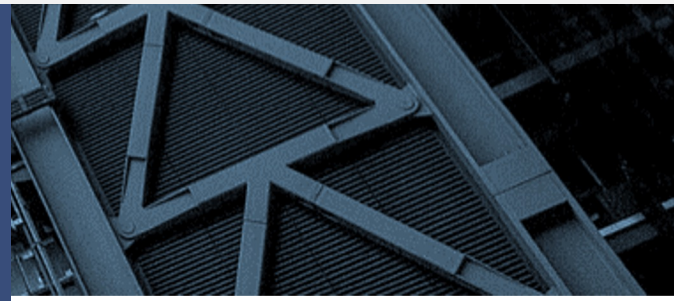

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

SPM berubah fungsi hanya terkait hajat hidup orang banyak

Jasa Konstruksi ?????

Kegiatan Konkuren

D K S D K

PENILAIAN MENGGUNAKAN IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI KEWENANGAN DAERAH)

PERMENDAGRI NO: 18/2020

IKK JAKON BOBOT 10%

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.
Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan Indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

DKSDK

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah → Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK OUTCOME PROVINSI

- Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

IKK OUTCOME KAB/KOTA

- Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat ~~kompetensi~~ pelatihan operator dan/atau teknis/analis
- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

D K S D K

PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PROVINSI

1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Provinsi
2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi
3. Jumlah Tenaga kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Provinsi
4. Terselengaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir.
5. Tersedianya Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi
6. Tersedianya Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari APBN
7. Tersedianya Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya
8. Tersedianya Data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi provinsi
9. Tersedianya Data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK)
10. Tersedianya Data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.
11. Tersedianya Data dan informasi Tenaga kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Provinsi
12. Tersedianya Data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.
13. Tersedianya Data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.
14. Tersedianya Data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

DKSDK

PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN/KOTA ---

1. Jumlah Pelatihan Tenaga ~~Ahli~~ Terampil Konstruksi di wilayah Kabupaten/kota
2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota
3. Jumlah Tenaga kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi ~~ahli~~ operator dan teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota.
4. Terselengaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termuktahir
5. Tersedianya Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota.
6. Tersedianya Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN.
7. Tersedianya Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya.
8. Tersedianya Data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termuktahir secara berkala.
9. Tersedianya Data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota

DKSDK

PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN/KOTA ---

10. Tersedianya Data dan informasi Pelatihan Tenaga operator dan teknisi/analis Konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah lainnya.
11. Tersedianya Data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis.
12. Tersedianya Data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota
13. Tersedianya Data dan Informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/Kota
14. Tersedianya Data dan informasi usaha pemenuhan komitmen pemohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
15. Tersedianya Data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.
16. Tersedianya Data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

DKSDK

PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN/KOTA - Produk

17. Tersedianya Data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.
18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/Kota
19. Jumlah usaha orang perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota
20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota
21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota
22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.
24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.
25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

DKSDK

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

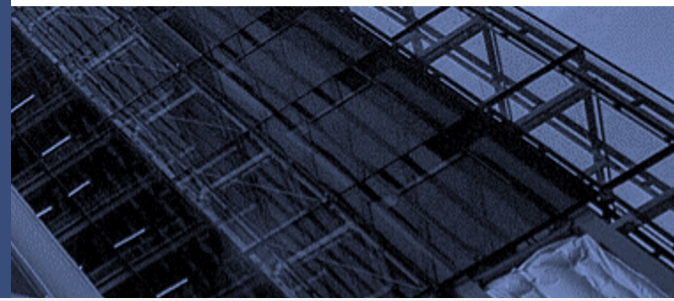

3

SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

PKSDK

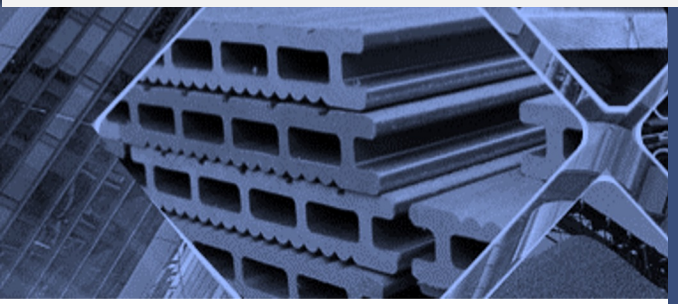

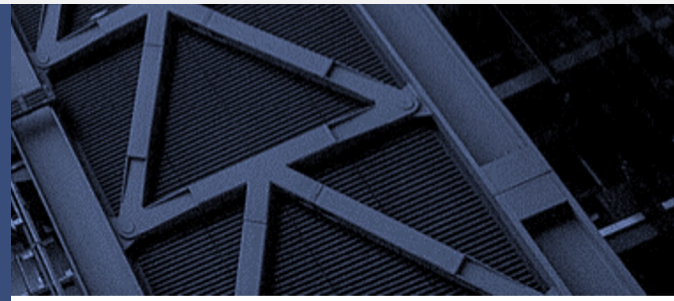

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

Apakah SIPJAKI ???

- **SIPJAKI** (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) adalah sistem informasi yang mewadahi **informasi bidang jasa konstruksi**, dan salah satu **media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi jasa konstruksi**. Penyelenggaraan konstruksi nasional perlu **didukung oleh suatu sistem informasi jasa konstruksi** yang **komprehensif dan realtime** agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya saing serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholders konstruksi;
- **SIPJAKI** juga diperuntukkan sebagai **database** sejumlah informasi, sekaligus **media pemantauan dan pengukuran keaktifan kegiatan jasa konstruksi** di Daerah yang dapat digunakan daerah untuk mengelola data dalam pemenuhan IKK.

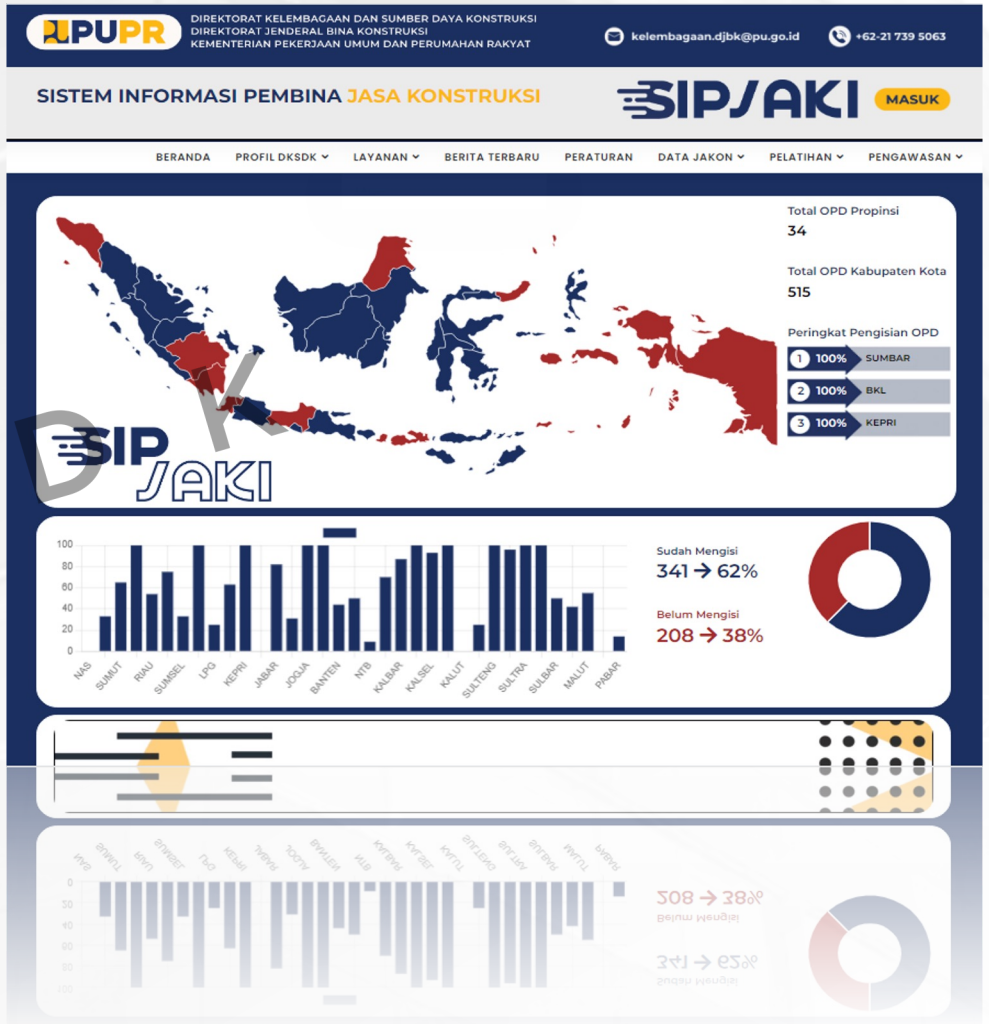

Mekanisme Pengelolaan SIPJAKI

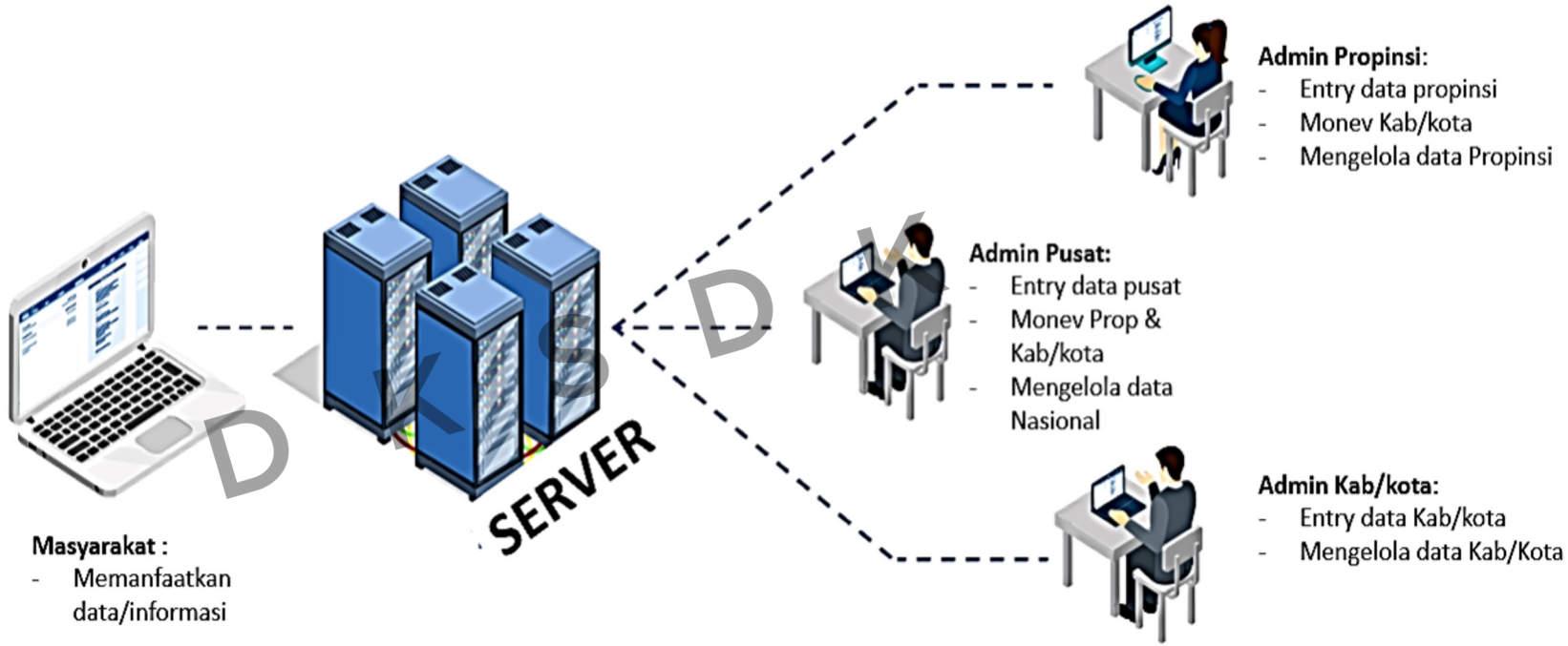

Gambar-5

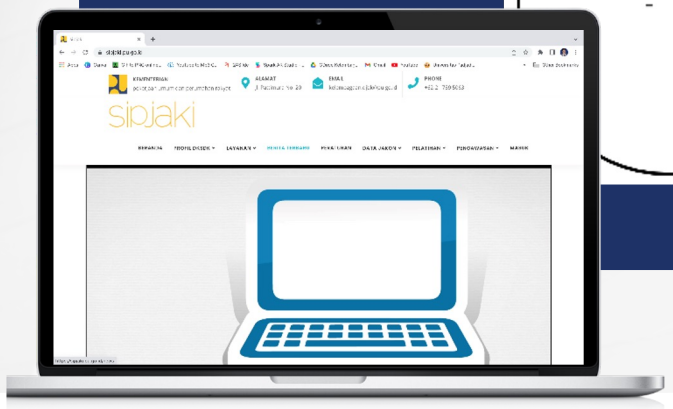

ADMINISTRATOR SIPJAKI

ADMINISTRATOR SIPJAKI

Definisi: personil yang bertugas melakukan *input* dan mengelola data SIPJAKI

JUMLAH IDEAL ADMINISTRATOR

- 2 (dua) orang tiap Provinsi atau kabupaten dan kota

DKSDK

3 kategori administrator SIPJAKI:

1. **Administrator Pusat**
2. **Administrator Provinsi**
3. **Administrator Kabupaten/Kota**

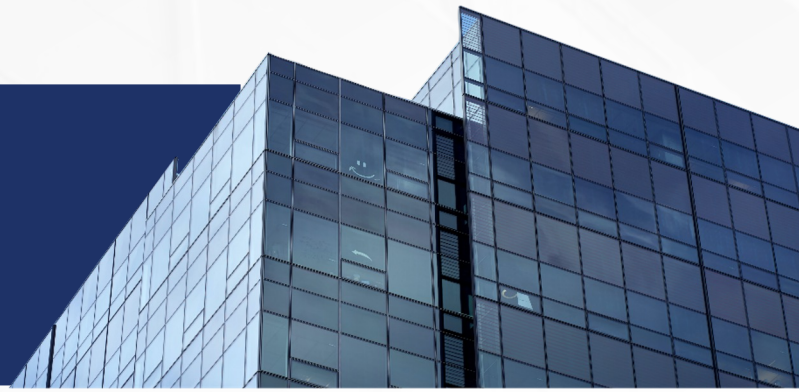

ADMINISTRATOR SIPJAKI

USERNAME & *PASSWORD* ADMINISTRATOR

- Untuk masuk kedalam aplikasi SIPJAKI diperlukan user name dan password
- Bagaimana mendapatkan username dan password?

SK Penetapan Administrator

Calon Admin Registrasi Daftar/Login

Pusat memvalidasi

- Username dan password tidak boleh diinformasikan ke siapapun karena data SIPJAKI sifatnya strategis dan sensitive
- 1 daerah 1 Akun | Menggunakan email bidang/dinas

PROSES PENYELENGGARAAN SIPJAKI

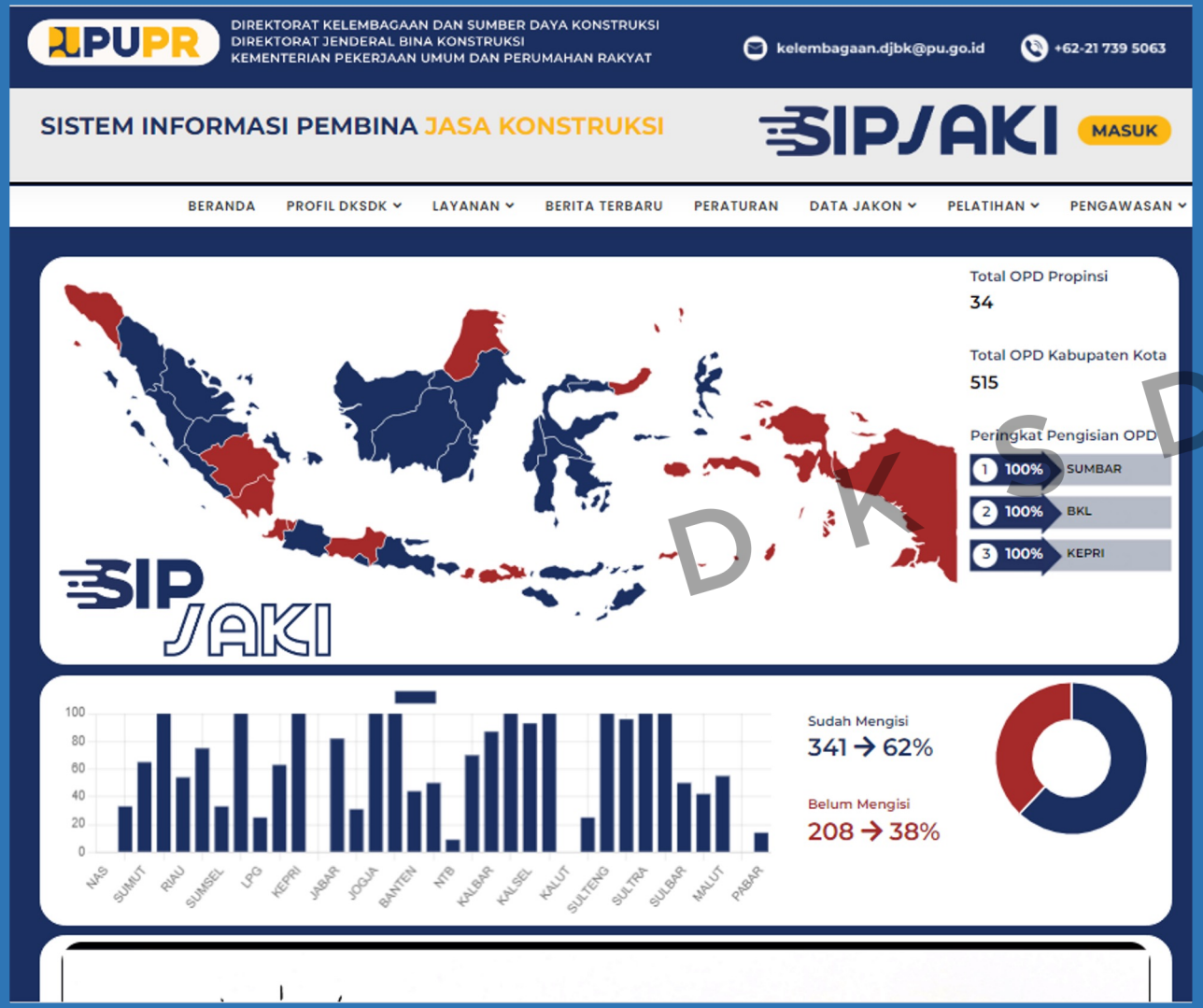

DKSDK

- ANGGARAN
- SDM – ADMIN – SK ADMIN
- HARDWARE-SOFTWARE-INTERNET
- PELATIHAN ADMIN – AKUN SIPJAKI
- PENCARIAN DATA/ INFORMASI

PENGELOLA SIPJAKI

A. ANGGARAN

Anggaran perlu disiapkan untuk menunjang kegiatan pembinaan jasa konstruksi terutama untuk pengumpulan data pembinaan jasa konstruksi

B. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia yang diperlukan untuk pengelolaan SIPJAKI adalah 2 (dua) admin untuk masing-masing kabupaten/kota atau propinsi serta penunjukan petugas untuk pengumpulan data.

C. PERALATAN

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan SIPJAKI mencakup : hardware, software dan jaringan internet.

D.PELATIHAN ADMIN

Mengingat teknologi akan berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan, maka Admin SIPJAKI secara periodik harus selalu diikutkan sertakan dalam pelatihan SIPJAKI.

E. PENGUMPULAN DAN ENTRY DATA

Data adalah bagian utama dari sebuah sistem informasi untuk itu pengumpulan data dan informasi harus selalu dilakukan agar informasi yang tersedia merupakan informasi terkini.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KINERJA PENGELOLAAN

0-100%

Kinerja pengelolaan SIPJAKI dapat dipakai untuk mengukur kinerja OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi. Pengukuran kinerja Pengelolaan SIPJAKI akan menggunakan skala ordinal dengan angka penilaian mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100%.

P K S D K

Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 0 (nol) apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota tidak mengentri data kedalam SIPJAKI, Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 50 (lima puluh), apabila admin propinsi atau admin kabupaten/kota mengentri data sebanyak 50% kedalam SIPJAKI, Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 100 (seratus) apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota mengentri data kedalam SIPJAKI sebanyak 100%.

PENYELENGGARAAN SIPJAKI CAKUPAN PROVINSI

LAMPIRAN KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5.1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPDAGRI 050-5889/2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang

DKSDK

PENYELENGGARAAN SIPJAKI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi

DKSDK

LAMPIRAN KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5.1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPDAGRI 050-5889/2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

UPAYA PERCEPATAN PEMENUHAN LAYANAN SIPJAKI

- SK Administrator Daerah
- Pelatihan Administrator daerah kabupaten/kota (pusat/provinsi)
- Pelatihan ToT daerah Provinsi /Kab/Kota

D K S D K

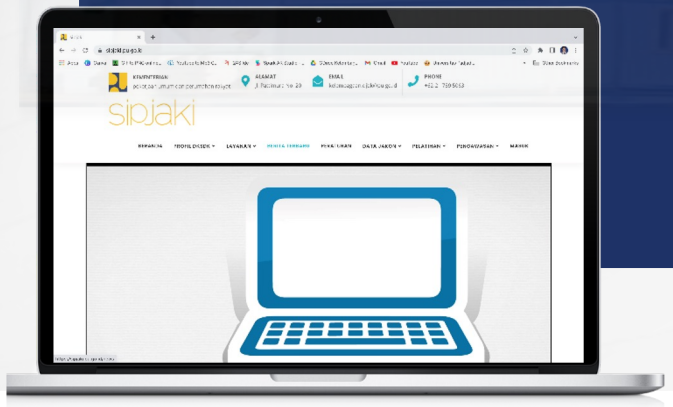

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENGEMBANGAN SIPJAKI

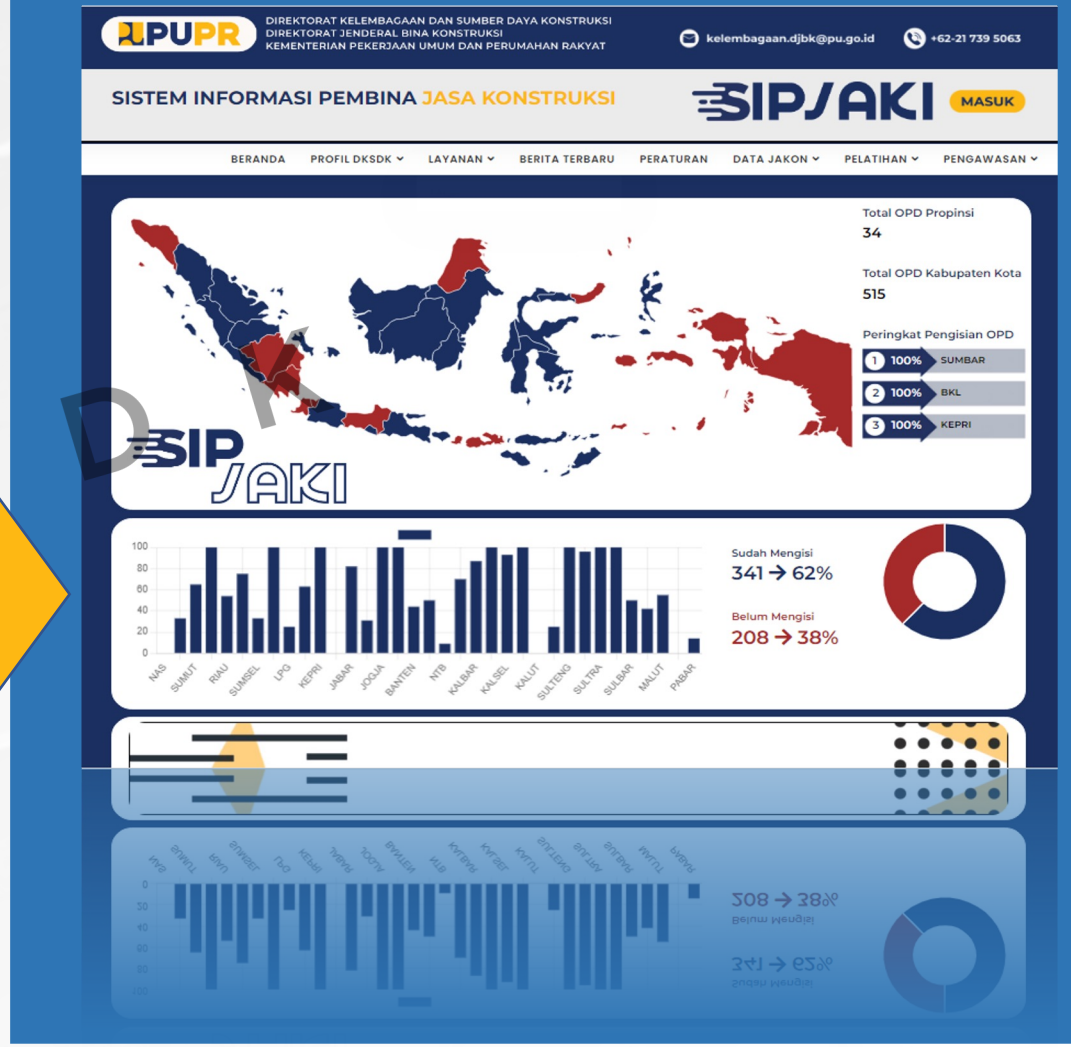

UPLOAD INFORMASI SIPJAKI (HALAMAN ADMIN) LAMA

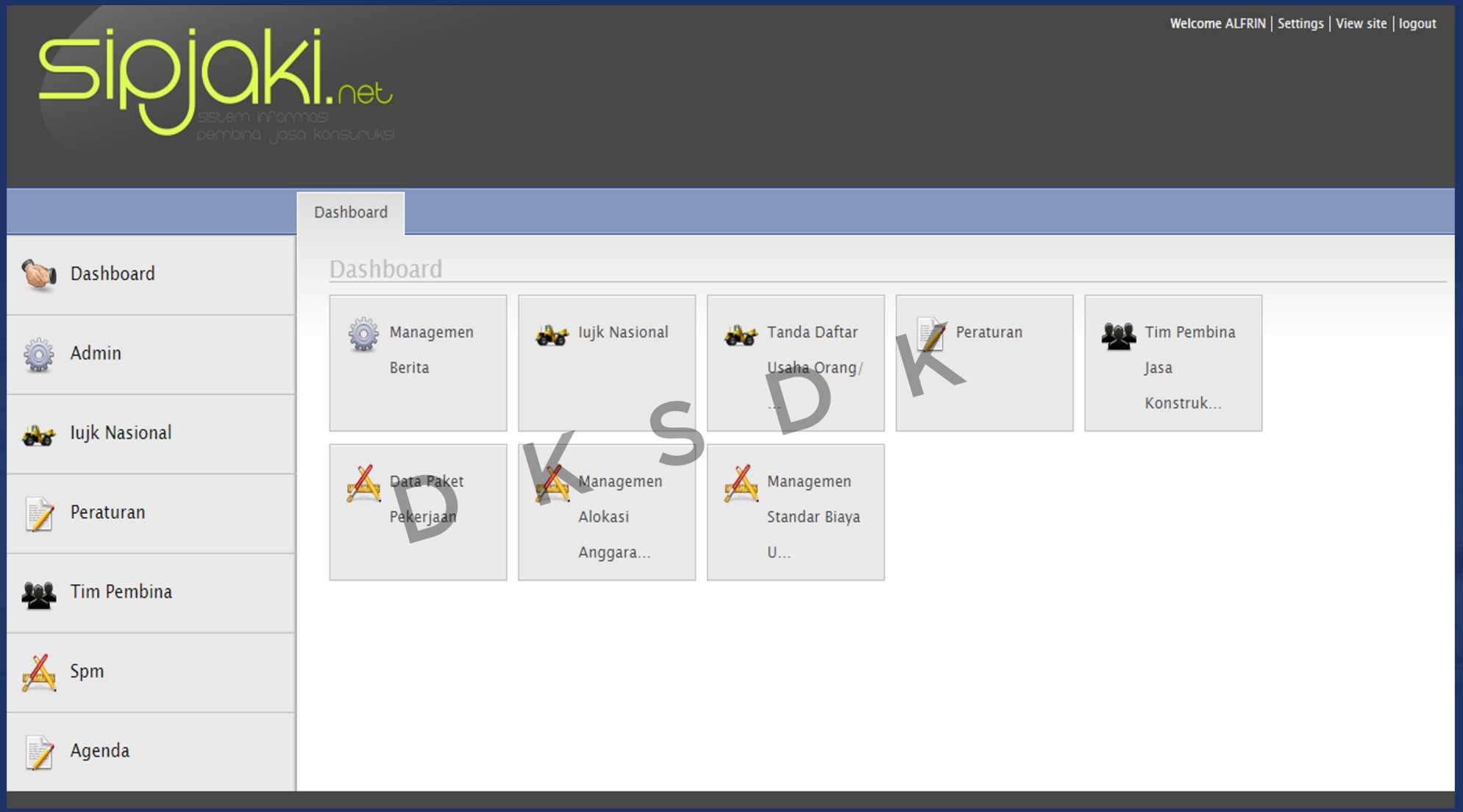

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENGEMBANGAN HALAMAN ADMIN (UPLOAD INFORMASI) SIPJAKI

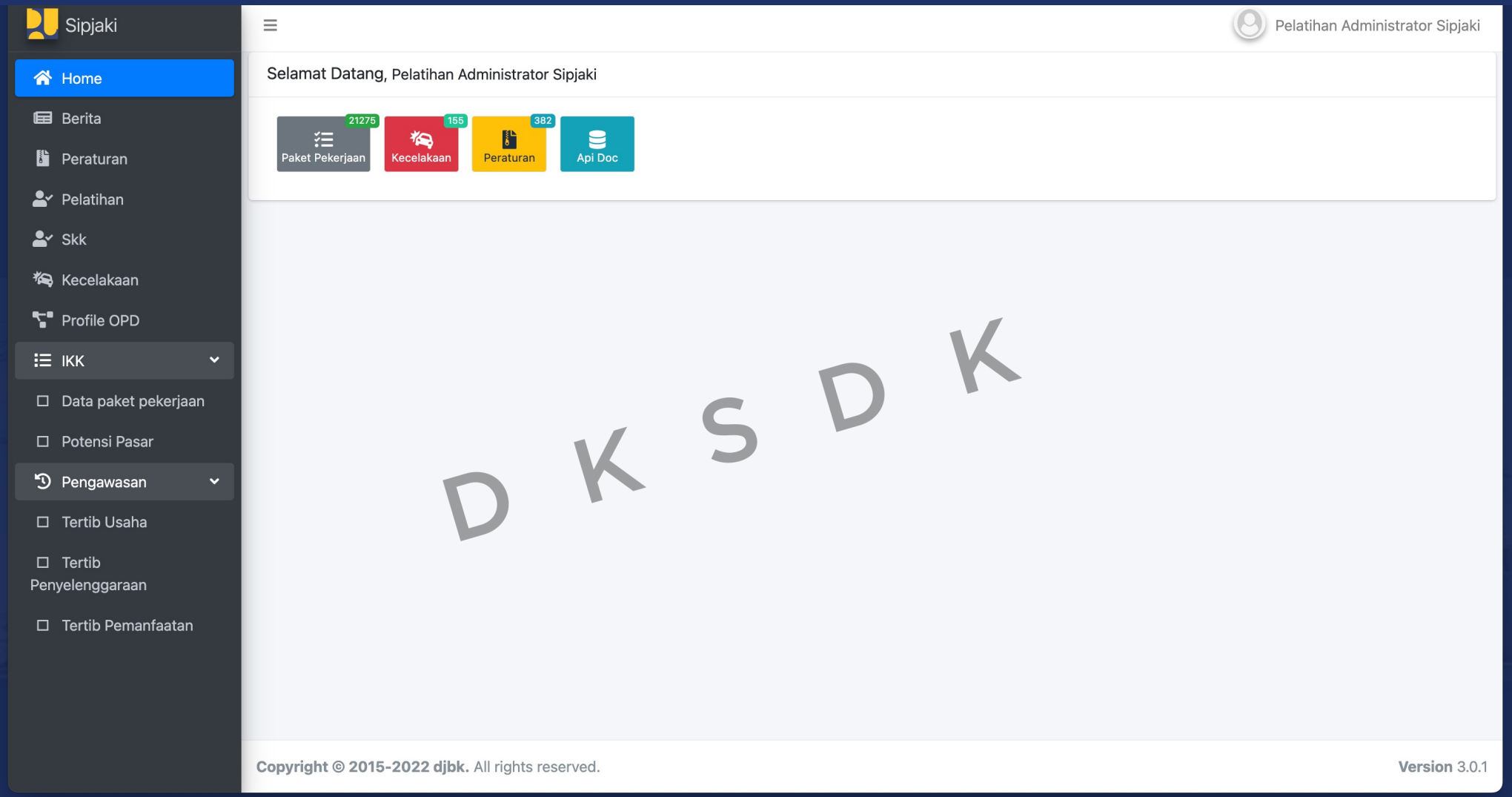

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

D K S D K

THANK YOU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif